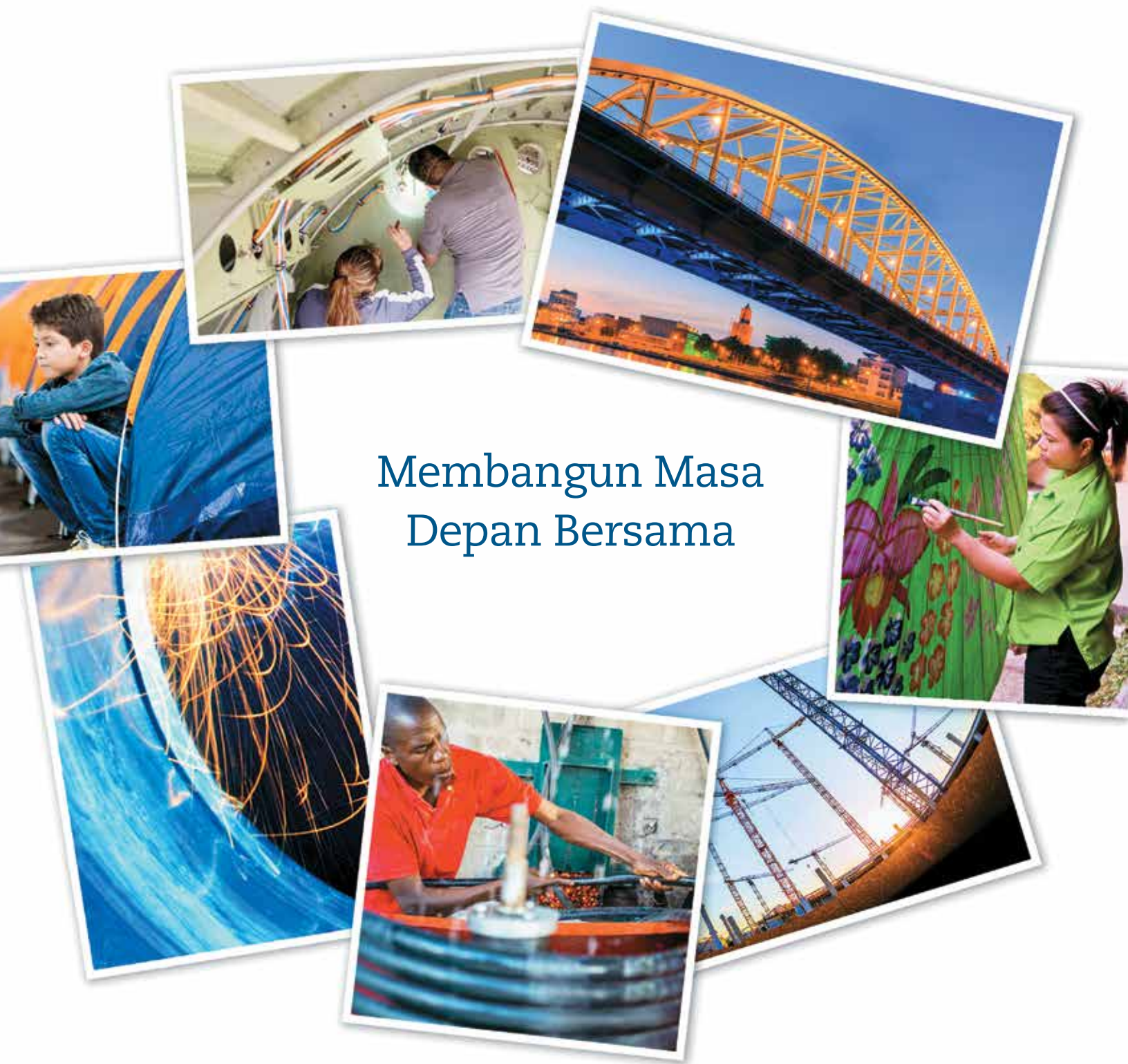


Laporan Tahunan IMF 2018

Tinjauan Umum



Membangun Masa
Depan Bersama

Pesan dari
Direktur Pelaksana

Pembaca
yang budiman,

Ekspansi perekonomian global yang telah kita saksikan selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan momentum, memberi harapan akan peningkatan lapangan pekerjaan dan standar hidup yang lebih baik di sebagian besar negara-negara anggota kita. Walau begitu, ancaman tetap ada, termasuk dari risiko eskalasi konflik perdagangan, utang pemerintah dan swasta yang tertinggi sepanjang sejarah, gejolak pasar keuangan, dan kondisi geopolitik yang rapuh.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, saya selalu dan terus berpesan kepada para anggota: waktu yang tepat untuk memperbaiki atap adalah saat matahari sedang bersinar.

Menghadapi
Perubahan
Iklim

Halaman

6



Halaman

4

Menangani
Ketidakseimbangan Global

Peluang saat ini masih terbuka. Untuk menjaga momentum, negara-negara perlu mengurangi risiko keuangan dan fiskal dengan memperkuat ketahanan sektor keuangan dan membangun kembali ruang kebijakan—serta perlu terus mendorong reformasi struktural yang akan membuat perekonomian tangguh menghadapi badai apa pun di masa mendatang. Negara-negara harus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan dan mengupayakan agar teknologi baru bekerja untuk semua—yang mendorong, dan bukan justru menekan, pertumbuhan inklusif dan stabilitas keuangan.

Melihat lebih jauh dalam jangka panjang, momentum perekonomian global sedang berada di bawah tekanan dari terkikisnya secara perlahan/melemahnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga—sedangkan kepercayaan sungguh merupakan urat nadi dari perekonomian mana pun. Merosotnya kepercayaan ini memiliki banyak dimensi: dampak krisis keuangan global yang masih membayangi, persepsi bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan globalisasi tidak tersebar secara adil, kecemasan tentang

pekerjaan di masa depan (*future of works*) peluang ekonomi, serta lemahnya kerangka tata kelola yang acap kali justru memfasilitasi korupsi. Populasi yang menua dan pendanaan skema pensiun yang lemah juga menahan momentum ini, dan kesenjangan pendapatan pun semakin lebar. Dan, jika tidak ditangani, perubahan iklim kemungkinan akan sangat merusak kesejahteraan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan. Negara-negara juga perlu tetap fokus pada berbagai tantangan tersebut yang dampaknya tidak langsung kentara karena berlangsung lama.



Mengatasi
Kesenjangan

Halaman

8



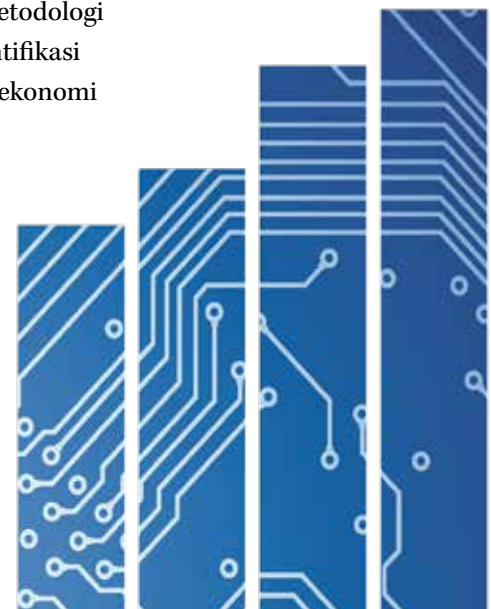
Halaman 10

Melawan Korupsi & Memperkuat Tata Pemerintahan

Seperti yang dapat dilihat dari Laporan Tahunan ini, Dewan Direktur Eksekutif dan staf kami tengah bekerja keras

melayani para anggota dan membantu mereka menghadapi tantangan-tantangan ini—dengan saran kebijakan, dengan program-program pinjaman, dan dalam pengembangan kapasitas. Sekadar contoh, kami telah berupaya memperkuat alat-alat pencegahan krisis; menyempurnakan metodologi untuk menganalisis ketidakseimbangan global dan nilai tukar, mengidentifikasi prioritas-prioritas reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk dalam bidang kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja; memperkuat analisis makro-finansial dan isu-isu makrostruktural kami; mengembangkan suatu kerangka baru untuk menangani korupsi dan kelemahan tata pemerintahan; memperdalam analisis kami mengenai ekonomi digital dan teknologi keuangan; dan semakin meningkatkan keterlibatan kami dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Saat kita menghadapi masa-masa perekonomian yang tidak pasti ini, saya yakin bahwa nilai-nilai yang mendasari pembentukan IMF—yang berpusat pada gagasan bahwa kerja sama perekonomian adalah jalan paling meyakinkan untuk hari esok yang lebih baik—kini semakin penting. Mari kita perbarui komitmen kita terhadap nilai-nilai tersebut.



Teknologi dalam Keuangan

Halaman 12



Christine Lagarde
Direktur Pelaksana

Tentang IMF

Dana Moneter Internasional (IMF) adalah organisasi global beranggotakan 189 negara-negara anggota yang didirikan untuk meningkatkan kesehatan ekonomi dunia. IMF bekerja untuk mendorong kerja sama moneter global, menjamin stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pengentasan kemiskinan di seluruh dunia. IMF, yang mengawasi sistem moneter internasional agar berjalan efektif, memiliki tujuan utama, antara lain, untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar dan memfasilitasi perluasan serta pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang. Misi IMF adalah untuk mendukung negara-negara (dan warga negaranya) untuk membeli barang dan jasa dari satu sama lain dan misi ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan standar kehidupan yang lebih baik. Semua negara anggota IMF terwakili dalam Dewan Eksekutif, yang mendiskusikan konsekuensi nasional, regional, dan global dari kebijakan ekonomi setiap anggota dan menyetujui pinjaman IMF untuk membantu negara-negara anggota mengatasi masalah neraca pembayaran yang sifatnya sementara, selain upaya-upaya pengembangan kapasitas. Laporan Tahunan ini meliputi kegiatan-kegiatan Dewan Eksekutif dan manajemen dan staf IMF untuk tahun anggaran 1 Mei 2017 hingga 30 April 2018. Isi laporan ini mencerminkan pandangan-pandangan dan diskusi-diskusi kebijakan Dewan Eksekutif IMF, yang telah berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Peran Utama Kami

IMF memainkan tiga peran utama sebagai berikut:

1 MEMBERIKAN SARAN KEPADA NEGARA ANGGOTA mengenai kebijakan-kebijakan yang perlu diambil untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan.

2 MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN kepada negara-negara anggota untuk membantu mengatasi masalah-masalah neraca pembayaran, termasuk kekurangan valuta asing yang terjadi ketika pembayaran eksternal melampaui penerimaan mata uang asing.

3 MENAWARKAN BANTUKAN TEKNIS DAN PELATIHAN, jika diminta, untuk membantu negara-negara anggota membangun dan memperkuat keahlian serta kelembagaan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan perekonomian yang kuat.

Kantor Pusat IMF terletak di Washington, DC, dan kantor-kantornya di seluruh dunia memiliki tujuan untuk meningkatkan jangkauan global IMF dan menjaga hubungan erat dengan anggota-anggotanya. Untuk informasi lebih lanjut tentang IMF dan negara-negara anggotanya, kunjungi www.imf.org

SOROTAN

Sebuah Kesempatan

Tahun lalu adalah tahun peningkatan kecemasan ekonomi dan ini berkaitan dengan skeptisisme akan integrasi ekonomi dan pendekatan internasional terhadap pembuatan kebijakan bidang ekonomi. Agar globalisasi dapat bermanfaat bagi semua, IMF fokus untuk memberikan saran kebijakan makro kritis, sebagai berikut:

Menjadikan sistem bekerja lebih baik

dengan cara mengatasi ketidakseimbangan global dan memperkuat jaring pengaman keuangan global

Menjadikan pertumbuhan berkelanjutan

mengatasi perubahan iklim

Mengamankan fondasi

memperkuat tata kelola dan mengatasi korupsi

Menjadikan pertumbuhan inklusif

mengatasi kesenjangan dalam berbagai bentuknya

Memanfaatkan teknologi untuk kebaikan

di bidang keuangan, dalam kebijakan fiskal

Pendekatan ini sesuai dengan peta kebijakan yang dipersiapkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (*Sustainable Development Goals-SDGs*), yang menunjukkan tautan yang jelas antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. IMF mendukung SDGs di bidang yang relevan dengan kegiatannya.

Sorotan:

Menjadikan Sistem Bekerja Lebih Baik

Stabilitas ekonomi makro global memerlukan komitmen dari semua negara.

Laporan Sektor Eksternal Tahun 2017 IMF menunjukkan bahwa ketidakseimbangan berlebih neraca transaksi berjalan saat ini—defisit atau surplus dalam transaksi suatu negara dengan negara-negara lain di dunia—adalah sekitar sepertiga dari total ketidakseimbangan global pada tahun 2016. Tingkat ketidakseimbangan ini, yang hampir tidak berubah sejak tahun 2016, menjadi semakin terkonsentrasi di negara-negara maju: defisit di Amerika Serikat dan Inggris Raya, dan surplus di negara-negara seperti Jerman, Jepang, Korea, Belanda, Singapura, dan Swedia. Ketidakseimbangan ini membuat ekonomi global lebih rentan terhadap pembalikan arus modal secara tiba-tiba dan berisiko memicu proteksionisme, dengan efek merugikan terhadap perdagangan dan pertumbuhan. Negara-negara dengan defisit yang berlebih harus memangkas defisit fiskal tanpa mengurangi program bagi warga miskin dan secara bertahap menyetel kembali kebijakan moneter dengan target-target inflasi. Negara-negara dengan surplus berlebih harus memberikan stimulus fiskal yang lebih besar. Kedua kelompok tersebut harus memprioritaskan reformasi struktural—yaitu meningkatkan investasi, mendorong persaingan di negara-negara surplus, serta mendorong tabungan dan meningkatkan daya saing di negara-negara defisit. Stabilitas ekonomi makro global adalah barang publik internasional (*international public good*) yang memerlukan komitmen dari semua negara.

IMF juga mendukung perluasan jaring pengaman keuangan global, yang melindungi stabilitas ekonomi makro dengan menyediakan asuransi untuk membantu mencegah krisis, membiayai ketika

krisis terjadi, dan memberikan insentif bagi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan yang dapat menanggulangi krisis agar jarang terjadi dan jika terjadi masih dalam batas yang terkendali. Sumber daya di balik jaring pengaman keuangan global meningkat tiga kali lipat antara tahun 2007 dan 2016. Hal ini mencerminkan bahwa

ekonomi global telah menjadi semakin kompleks, rentan terhadap gejolak, dan saling terkait.

Selama setahun terakhir ini, IMF meningkatkan kontribusinya kepada jaring pengaman keuangan global. IMF memperbarui panduannya berkenaan dengan pagu kredit pencegahan krisis—*Flexible Credit Line* (FCL) dan *Precautionary and Liquidity Line* (PLL)—untuk membuat proses kualifikasi lebih terprediksi dan transparan. IMF juga mengusulkan sebuah kerangka untuk kolaborasi yang lebih baik dengan pengaturan keuangan regional untuk meningkatkan jaring pengaman keuangan global dan memanfaatkan keunggulan komparatif terpisah dari pengaturan pembiayaan regional (pengetahuan dan koneksi regional) dan IMF (pengalaman dalam penyesuaian ekonomi makro dan *pooling* risiko universalnya) dalam mencegah dan menanggulangi krisis.

Dalam pengembangan kapasitas, IMF bekerja dengan lebih dari 40 mitra bilateral dan multilateral mengenai inisiatif ekonomi makro utama di seluruh dunia. Beberapa dana tematik diselaraskan dengan kebutuhan dan inisiatif pembangunan global yang penting, termasuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*2030 Agenda for Sustainable Development*) dan Pembiayaan untuk Agenda Pembangunan (*Financing for Development Agenda*). Kegiatan-kegiatan mereka dilengkapi oleh kerja yang ekstensif dari pusat pengembangan kapasitas regional IMF, yang dibiayai oleh mitra pembangunan, negara anggota, dan IMF.





PELAJARAN

Jaring pengaman keuangan global memiliki empat lapis utama:

1. **Cadangan masing-masing negara** negara meningkat dari sekitar \$2 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar \$11 triliun pada tahun 2017. Sumber daya kuota IMF telah berlipat dua menjadi sekitar \$670 miliar.
2. **Skema swap bilateral (*bilateral swap arrangements*)** antara dua negara berbentuk swap permanen tak terbatas (*unlimited permanent swaps*) antara bank-bank sentral dari beberapa negara-negara besar yang menerbitkan mata uang cadangan, dan suatu jejaring swap antara Tiongkok dan negara lain untuk mendukung perdagangan dan investasi.
3. **Skema pembiayaan regional (*regional swap arrangements*)** termasuk *European Stability Mechanism*, dengan kapasitas pinjaman sebesar 500 miliar euro; *Chiang Mai Initiative Multilateralization*, dengan \$240 miliar; dan *Contingent Reserve Arrangement* antara Brasil, Tiongkok, India, Rusia, dan Afrika Selatan, bernilai \$100 miliar.
4. **IMF**, selain memberi pinjaman untuk membantu negara mengatasi krisis neraca pembayaran, dapat memberikan pagu kredit yang dapat digunakan atas dasar pencadangan atau dana siaga, kepada negara-negara dengan fundamental ekonomi yang kuat. Skema pinjaman tersebut meliputi FCL untuk negara-negara dengan fundamental dan kebijakan yang sangat kuat, dan PLL, untuk negara-negara dengan fundamental yang kuat dan kerentanan terbatas.



DI BALIK LAYAR

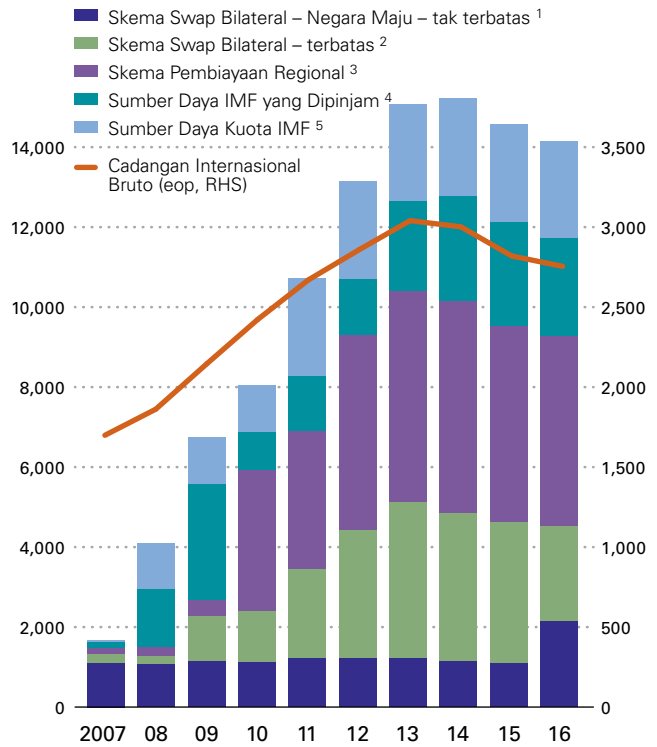
Kecukupan Jaring Pengaman Keuangan Global: Tinjauan terhadap *Flexible Credit Line* dan *Precautionary and Liquidity Line*, dan *Proposal untuk Reformasi Toolkit—Revisi Proposal*

Tinjauan IMF terhadap *Flexible Credit Line* dan *Precautionary and Liquidity Line* mendapati bahwa instrumen-instrumen ini telah secara efektif memberikan dukungan kepada negara-negara anggota dari risiko eksternal atas dasar pencadangan (*precautionary basis*), dan bahwa pengaturan FCL berikutnya serta tingkat akses yang terkait telah disesuaikan secara tepat dengan keadaan suatu negara. Tinjauan tersebut memperkenalkan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap kerangka kualifikasi untuk FCL dan PLL agar lebih transparan dan terprediksi untuk pengguna saat ini dan pengguna potensial.

GAMBAR 1.1

Jaring pengaman keuangan global yang berkembang tiga kali lipat sejak 2018

Jumlah dan jenis sumber daya yang tersedia bagi negara-negara berkembang secara dramatis setelah tahun 2007. Miliar dolar AS



Sumber: Bank of England; situs-situs web bank sentral; laporan tahunan RFA; dan prakiraan staf IMF.

¹ Diprakirakan berdasarkan penggunaan yang diketahui sebelumnya atau, jika tidak diambil, berdasarkan rata-rata penarikan maksimum terakhir dari anggota bank sentral yang lain dalam jejaring tersebut. Skema dua arah hanya dihitung sekali.

² Termasuk semua skema dengan batas nilai eksplisit dan tidak termasuk skema CMIM, yang termasuk dalam RFA. Skema dua arah hanya dihitung sekali.

³ Berdasarkan kapasitas/batas peminjaman eksplisit apabila tersedia, sumber daya yang sudah terikat, atau prakiraan kapasitas peminjaman berdasarkan batas akses negara dan modal yang dibayar.

⁴ Setelah saldo prudensial.

⁵ Untuk negara-negara dalam Rencana Transaksi Keuangan (Financial Transaction Plan – FTP) setelah dikurangi saldo prudensial.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang Relevan

KEMITRAAN
UNTUK
TUJUAN-TUJUAN



Sorotan:

Menciptakan Pertumbuhan Berkelanjutan

Peningkatan suhu dapat menimbulkan biaya ekonomi yang besar.

Jika tidak ditangani, perubahan iklim berpotensi menjadi salah satu guncangan ekonomi terbesar di abad 21, yang disebabkan oleh efek merugikan seperti suhu yang lebih panas, bencana alam yang lebih besar dan lebih sering, naiknya permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati di dalam ekosistem yang terkuras.

Penelitian IMF dalam *World Economic Outlook* bulan Oktober 2017 menunjukkan bahwa biaya ekonomi akibat kenaikan suhu dapat menjadi substansial, terutama bagi negara-negara berkembang berpendapatan rendah, yang justru menghasilkan sangat sedikit emisi gas rumah kaca. Secara median, bagi negara berkembang dengan pendapatan rendah dengan suhu 25 derajat Celcius, setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengurangi PDB per kapita sekitar 1,5 persen—dan kerugian tersebut akan bertahan setidaknya selama tujuh tahun.

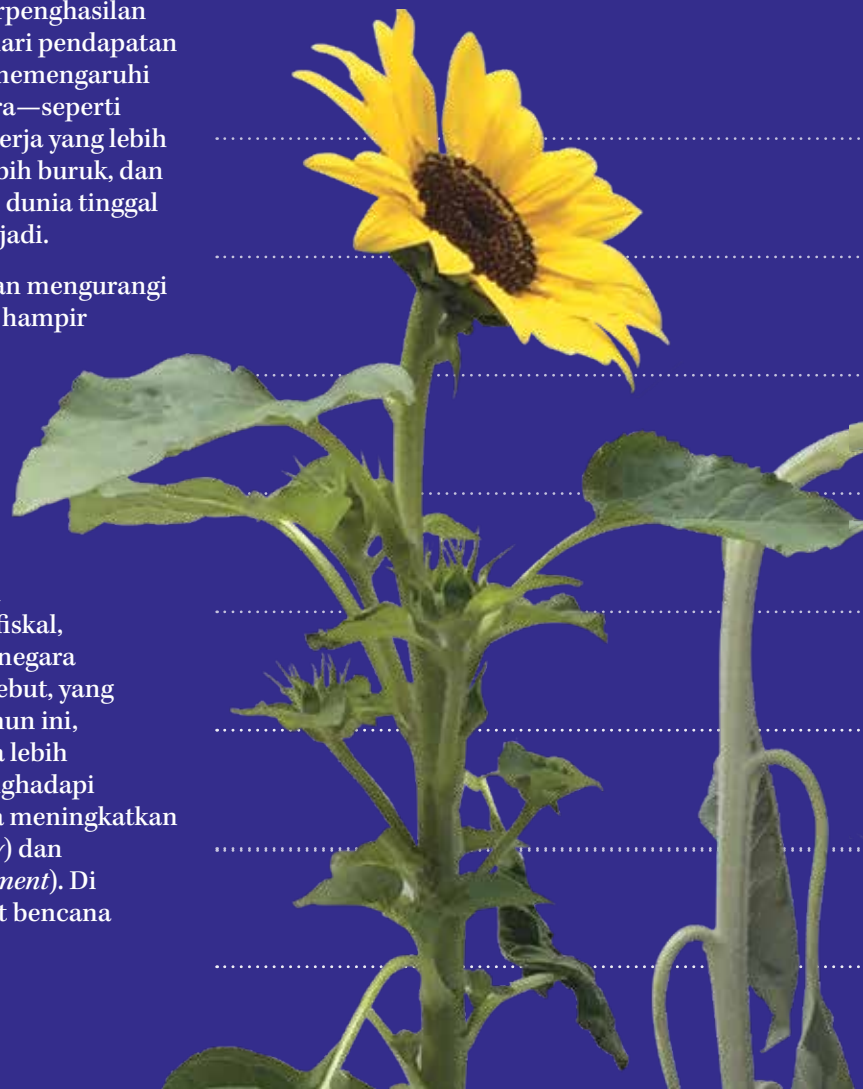
Jika emisi tidak dibatasi, suatu negara berkembang berpenghasilan rendah median bisa kehilangan hingga sepersepuluh dari pendapatan per kapitanya pada akhir abad ini. Peningkatan suhu memengaruhi hasil ekonomi (*economic outcomes*) melalui banyak cara—seperti output pertanian yang lebih rendah, produktivitas pekerja yang lebih rendah karena terpapar oleh panas, kesehatan yang lebih buruk, dan investasi yang lebih rendah. Sekitar 60 persen warga di dunia tinggal di negara-negara di mana dampak-dampak ini bisa terjadi.

Untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi, *Paris Accord* (Peretujuan Paris) disepakati oleh hampir 200 negara. IMF sedang mengembangkan perangkat *spreadsheet* untuk setiap negara anggota IMF untuk menghitung tingkat penetapan harga karbon yang diperlukan dan *trade-off* dengan instrumen lain seperti perdagangan emisi, insentif efisiensi energi, pajak atas listrik, dan pajak atas masing-masing jenis bahan bakar.

Temuan-temuan dari penelitian tersebut menekankan berbagai keuntungan yang substansial terhadap iklim, fiskal, dan ekonomi dari pajak karbon dan persebaran lintas negara yang luas terhadap kebutuhan akan harga karbon tersebut, yang menekankan pentingnya koordinasi internasional. Tahun ini, Dewan Eksekutif IMF sepakat untuk membantu secara lebih jauh lagi negara-negara berkembang yang sedang menghadapi kebutuhan neraca pembayaran mendesak dengan cara meningkatkan batas akses Fasilitas Kredit Cepat (*Rapid Credit Facility*) dan Instrumen Pembiayaan Cepat (*Rapid Financing Instrument*). Di negara-negara berkembang kecil, biaya tahunan akibat bencana

mencapai hampir 2 persen PDB—lebih dari empat kali lebih tinggi daripada di negara-negara besar. Pengembangan kapasitas membantu negara-negara anggota membangun rerangka manajemen keuangan publik yang tangguh, melakukan reformasi pajak lingkungan, dan menetapkan harga energi secara tepat untuk mencerminkan efek samping lingkungan yang merugikan akibat perubahan iklim.

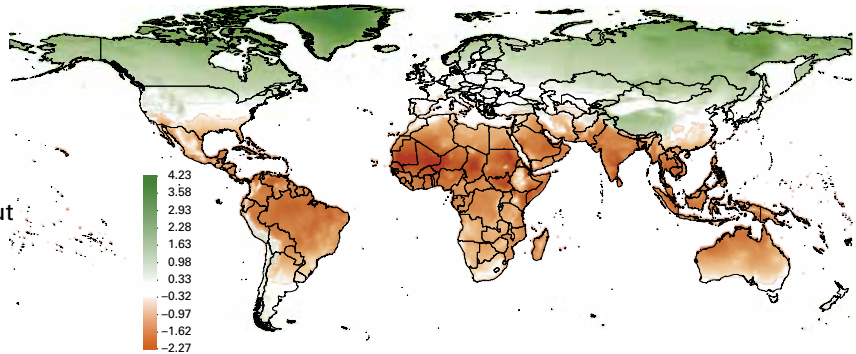
IMF, bekerja sama dengan Bank Dunia, juga memperkenalkan Penilaian Kebijakan Perubahan Iklim (*Climate Change Policy Assessments*), yang memberikan penilaian menyeluruh tentang mitigasi iklim, pembangunan ketahanan, dan strategi pembiayaan untuk negara-negara kecil, dalam rerangka fiskal makro yang berkelanjutan.



Dampak peningkatan suhu terhadap output per kapita di seluruh dunia

Dampak Kenaikan Suhu terhadap Output per Kapita Riil seluruh Dunia (Persen)

Kenaikan suhu memiliki dampak yang sangat tidak merata di seluruh dunia, dengan konsekuensi yang merugikan terkonsentrasi di bagian dunia tempat mayoritas penduduk dunia tinggal.



Sources: Natural Earth; Scapre Taod; Database Prospek Populasi Dunia Database: Revisi 2015; Bank Dunia; dan perhitungan staf IMF.

PELAJARAN

Fasilitas Kredit Cepat (*Rapid Credit Facility*) IMF

Fasilitas Kredit Cepat IMF dirancang untuk menyediakan pinjaman cepat tanpa bunga dengan prasyarat-prasyarat terbatas kepada negara-negara berkembang berpenghasilan rendah yang sedang menghadapi kebutuhan neraca pembayaran yang mendesak. Fasilitas ini memberikan penekanan pada tujuan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan dari negara-negara tersebut. Fasilitas ini diciptakan di bawah *Poverty Reduction and Growth Trust* (Dana Amanah Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan-PRGT) sebagai bagian dari reformasi lebih luas untuk membuat dukungan IMF lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan beragam kebutuhan negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, termasuk pada masa krisis.

2030

Fasilitas ini tersedia untuk negara-negara anggota yang memenuhi syarat PRGT, dan bantuan ini merupakan suatu pinjaman satu kali pencairan (*one-time loan disbursement*). Suatu negara dapat meminta bantuan kembali di bawah Fasilitas Kredit Cepat (*Rapid Credit Facility-RCF*) dalam jangka waktu tiga tahun mana pun jika kebutuhan neraca pembayaran negara tersebut disebabkan terutama oleh guncangan eksogen atau negara tersebut sudah memiliki rekam jejak kebijakan ekonomi makro yang memadai.

2040

Pada bulan Juni 2017, IMF menyetujui pencairan pinjaman di

2050

bawah (RCF) tersebut untuk Gambia.

DI BALIK LAYAR

Efek Guncangan Cuaca terhadap Kegiatan Ekonomi: Bagaimana Negara-negara Berpendapatan Rendah Mengatasinya?

World Economic Outlook bulan Oktober 2017 tentang perubahan iklim menyatakan bahwa kenaikan suhu memiliki dampak ekonomi makro yang tidak merata, dengan konsekuensi yang merugikan terkonsentrasi di negara-negara dengan iklim yang relatif panas, seperti sebagian besar negara berkembang berpenghasilan rendah. Kebijakan domestik dan pembangunan yang baik serta investasi pada strategi adaptasi tertentu, pada umumnya, dapat membantu mengurangi kerugian akibat guncangan cuaca. Namun, mengingat keterbatasan negara-negara berpenghasilan rendah, masyarakat internasional harus mendukung negara-negara ini selama mereka mengatasi perubahan iklim—sebuah ancaman global yang minim kontribusinya oleh negara-negara tersebut.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang Relevan

TINDAKAN TERKAIT IKLIM



Sorotan:

Meciptakan Pertumbuhan Inklusif

Mengurangi tingkat kesenjangan dapat membuka pintu menuju pertumbuhan dan stabilitas.

Kesenjangan global—perbedaan tingkat pendapatan antar negara—sudah mengalami penurunan, tetapi situasi di masing-masing negara tersebut kurang jelas dan bervariasi, tergantung pada kelompok pendapatan dan faktor spesifik tiap negara. Penelitian IMF telah menunjukkan bahwa kesenjangan yang terus-menerus tinggi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang tahan lama serta ketidakstabilan keuangan yang lebih besar—hal yang menjadikan pengurangan kesenjangan menjadi terkait langsung dengan kerja IMF.

Apa dampak distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan dan stabilitas?

Kesenjangan membuat sumber daya menjadi sia-sia. Dalam perekonomian yang sangat tidak setara, warga miskin kemungkinan tidak memiliki akses ke pendidikan, pasar keuangan, atau peluang lain untuk meningkatkan penghasilan. Hal ini menyulitkan mereka untuk mengembangkan kemampuan produktif mereka.

Kesenjangan yang diakibatkan oleh buruknya prospek pekerjaan diasosiasikan dengan biaya yang lebih mahal. Pengangguran yang berkepanjangan menurunkan keterampilan, membatasi kemampuan untuk bekerja (*employability*), dan mengurangi kepercayaan pada pemerintah. Efek ini sangat serius khususnya di kalangan anak muda, yang di beberapa negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, dan bagi perempuan di negara-negara di mana diskriminasi, kebiasaan sosial, atau kesempatan yang tidak setara menghambat mereka masuk ke dalam angkatan kerja.

Kesenjangan dapat mendorong polarisasi dan ketidakpercayaan. Ketika warga negara merasa diperlakukan tidak adil, lemahnya kerekatan sosial dapat menyebabkan lebih banyak persaingan politik atas sumber daya publik, perburuan rente, dan kesulitan lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan yang diperlukan bagi pertumbuhan inklusif jangka panjang. Dalam kasus ekstrem, polarisasi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik.

Kesenjangan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro. Kesenjangan melemahkan kemampuan untuk mengatasi risiko—masyarakat yang sangat tidak setara cenderung tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengamankan diri dari disrupsi ekonomi. Kesenjangan yang tinggi juga dapat meningkatkan kerapuhan keuangan—khususnya oleh meningkatnya tabungan para orang kaya dan meningkatnya permintaan kredit warga miskin dan kelas menengah yang terjadi secara bersamaan.

Kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sementara juga meningkatkan pertumbuhan dan inklusi ekonomi meliputi perluasan akses ke pendidikan berkualitas dan kesehatan untuk masyarakat miskin, investasi dalam infrastruktur, pendalaman inklusi keuangan untuk menjangkau yang paling rentan, dan pemberian insentif bagi peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan.

Pengumpulan penerimaan (*revenue collection*) dan belanja yang tepat sasaran (*targeted spending*) sangat penting dalam konteks ini—*Fiscal Monitor: Tackling Inequality* bulan Oktober 2017 membahas beberapa opsi untuk mengatasi kesenjangan sementara meraih keseimbangan yang tepat antara efisiensi dan kesetaraan. Pajak penghasilan progresif yang dirancang dengan baik, serta pajak kekayaan tertentu, dapat berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan tanpa mengorbankan pertumbuhan. Pekerjaan empiris yang sedang dilakukan menunjukkan bahwa “penghasilan dasar universal” (*universal basic income*) memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan namun bergantung pada kapasitas administratif suatu negara

dan kemampuan untuk mempertajam penentuan sasaran belanja sosial.

AKSES KE PERBANKAN



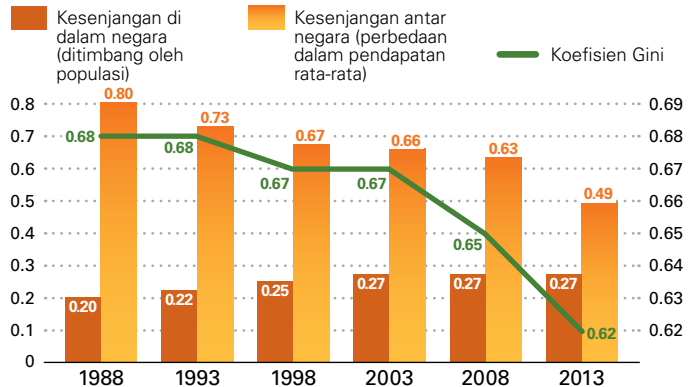
Mendorong Pertumbuhan Inklusif

Semakin banyak bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan keuntungan yang merata bagi masyarakat dan kesenjangan dapat berbahaya secara ekonomi makro. Sebuah makalah IMF menunjukkan bahwa kebijakan domestik adalah kunci dalam menerjemahkan pertumbuhan yang kuat menjadi kemakmuran bagi semua. Negara-negara harus mengadopsi kerangka kebijakan yang menjaga pertumbuhan berkelanjutan dengan stabilitas ekonomi makro. Mendorong pertumbuhan inklusif membutuhkan tindakan untuk meningkatkan produktivitas dan pada saat yang sama memastikan bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi tidak mengorbankan kesetaraan. Kursus “*Inclusive Growth*” IMF, yang diluncurkan pada tahun 2013, membahas perangkat-perangkat analitis dan operasional untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan telah menjadi salah satu penawaran kursus IMF yang paling diminati di seluruh dunia.



GAMBAR 1.3

Ketimpangan Global telah Menurun...



Sumber: Lakner dan Milanovic 2016; Milanovic 2016; dan Bank Dunia 2016.

Catatan: Ketinggian pilar mengindikasikan tingkat kesenjangan global diukur oleh rata-rata deviasi log (skala tangan kiri). Koefisien Gini mewakili pendapatan atau distribusi kekayaan penduduk suatu negara, di mana rasio 1 (atau 100%) menunjukkan kesenjangan maksimal.

PELAJARAN

...Namun Tetap Tinggi di dalam Negara-Negara.

Meskipun kesenjangan pendapatan antar-negara telah menyempit, kesenjangan di dalam negara-negara meningkat sejak pertengahan tahun 1980-an hingga pertengahan 2000-an, terutama di negara-negara maju. Banyak faktor dapat menjelaskan kecenderungan ini:

Kemajuan teknologi terutama telah menguntungkan pemilik modal dan pekerja yang sangat terampil.

Perdagangan internasional, meskipun tetap menjadi mesin vital bagi pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, perdagangan internasional—bersama dengan teknologi yang menghemat tenaga kerja dan praktik *outsourcing*—di negara-negara maju telah menyebabkan sejumlah pekerjaan hilang dan berpindah.

Integrasi keuangan, tanpa regulasi yang memadai, dapat meningkatkan kerentanan terhadap krisis keuangan dan meningkatkan daya tawar modal.

Kebijakan domestik, di beberapa negara, telah mengurangi daya tawar tenaga kerja, meningkatkan pemusatan korporat, membuat pajak menjadi kurang progresif, dan melemahkan perlindungan sosial.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang Relevan

KESETARAAN GENDER

PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

MENGURANGI KESENJANGAN

Sorotan:

Memberantas Korupsi

Mengupas Berbagai Lapisan Korupsi.

Tata kelola yang baik, tanpa korupsi sistemik, sangat penting bagi stabilitas ekonomi makro serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian IMF menunjukkan bahwa korupsi sistemik—yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi—berhubungan dengan pertumbuhan dan investasi yang lebih rendah dan kesenjangan yang lebih tinggi.

Korupsi melemahkan kemampuan negara untuk memungut pajak, sebagian dengan melemahkan sistem perpajakan melalui persepsi ketidakadilan dan favoritisme, sehingga dapat mengurangi kas negara. Korupsi juga mendistorsi pengeluaran pemerintah dengan mempromosikan proyek-proyek yang terlalu besar dan boros yang menghasilkan suap (*kickback*), hingga merugikan investasi di bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang positif. Dan karena warga miskin amat bergantung pada layanan pemerintah, distorsi semacam ini memengaruhi mereka secara sangat tidak proporsional dan membatasi peluang ekonomi mereka.

Pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif juga terancam jika pemerintah tidak dapat memastikan lingkungan bisnis yang berdasarkan imparialitas dan prinsip-prinsip hukum (*rule of law*). Suap membuat investasi menjadi lebih mahal—ketika korupsi bersifat sistemik, suap berlaku seperti pajak atas investasi. Dan jika korupsi melimpas ke regulasi dan pengawasan sektor keuangan, stabilitas keuangan juga dapat berisiko.

Korupsi dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perpecahan dalam suatu negara, yang kemudian memiliki efek tidak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan inklusif. Sebagai contoh, ketika kaum muda tidak merasa investasi dalam keterampilan dan pendidikan memberi imbalan yang menarik, hal ini akan menyusutkan prospek peningkatan produktivitas sekaligus mengobarkan perasaan tidak puas.

IMF baru-baru ini memperbarui kebijakannya tentang tata kelola dan korupsi, yang menekankan bahwa IMF harus menangani korupsi ketika hal tersebut memiliki dampak ekonomi makro yang signifikan. Kebijakan baru tersebut memberikan panduan untuk menilai

sifat dan tingkat korupsi dan dampak ekonomi makronya. Untuk memastikan kerja IMF yang lebih sistematis, jujur, dan adil dalam tata kelola dan korupsi, kebijakan tersebut fokus baik pada “sisi penawaran” (*supply side*) dari korupsi (*suap yang diberikan*) dan “sisi permintaan” (*demand side*) (*suap yang diambil*). Menangani korupsi secara efektif perlu melibatkan langkah-langkah untuk membatasi praktik korupsi, baik langsung—misalnya, menyuap pejabat asing—atau tidak langsung—misalnya pencucian “uang kotor” (*dirty money*).

**KORUPSI
MENYEBABKAN
BELANJA
ANGGARAN
MUBAZIR**

Kebijakan dan Pengembangan Kapasitas IMF Melawan Korupsi

Kebijakan tata kelola dan korupsi IMF mencatat bahwa IMF telah memberikan saran kebijakan yang rinci untuk mengurangi korupsi dalam laporan-laporan tentang pemeriksaan kesehatan masing-masing negara. Saran sering dikembangkan untuk menerangkan pinjaman IMF yang sedang berlangsung atau prospektif dan mencerminkan temuan misi pengembangan kapasitas IMF, bekerja sama dengan Bank Dunia dan mitra lainnya. Saran kebijakan rinci tentang strategi untuk mengurangi korupsi telah diberikan sebagai bagian dari beberapa tinjauan *Article IV*.

Bagaimana Korupsi Memengaruhi Perekonomian?

Penelitian IMF menunjukkan bahwa mengurangi korupsi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi: Penurunan dari persentil ke-50 hingga ke-25 dalam indeks korupsi atau tata kelola berhubungan dengan penurunan tingkat pertumbuhan PDB per kapita tahunan hingga setengah poin persentase atau lebih, dan penurunan rasio investasi terhadap PDB sebesar 1½-2 poin persentase.

**KORUPSI
MENYULUT
KETIDAKPUASAN**

**KORUPSI
MENGIKIS
KEPERCAYAAN
TERHADAP LEMBAGA**

**KORUPSI TERUTAMA
BERDAMPAK KEPADA
MASYARAKAT
MISKIN**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang Relevan

**PERDAMAIAN,
Keadilan, dan
Kelembagaan
yang Kuat**



Sorotan:

Memanfaatkan Teknologi demi Kebaikan

Memastikan kemajuan teknologi dinikmati secara luas.

Sejak dimulainya revolusi industri, dampak perubahan teknologi terhadap prospek pekerjaan dan kesenjangan sudah menimbulkan kekhawatiran. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang belakangan ini terjadi semakin meningkatkan kekhawatiran tersebut. IMF telah menelaah topik di berbagai bidang yang mencakup masa depan pekerjaan dan berbagai implikasinya, baik untuk stabilitas keuangan maupun kebijakan fiskal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi akan mendukung, alih-alih melemahkan, kekuatan ekonomi makro dan pertumbuhan yang inklusif.

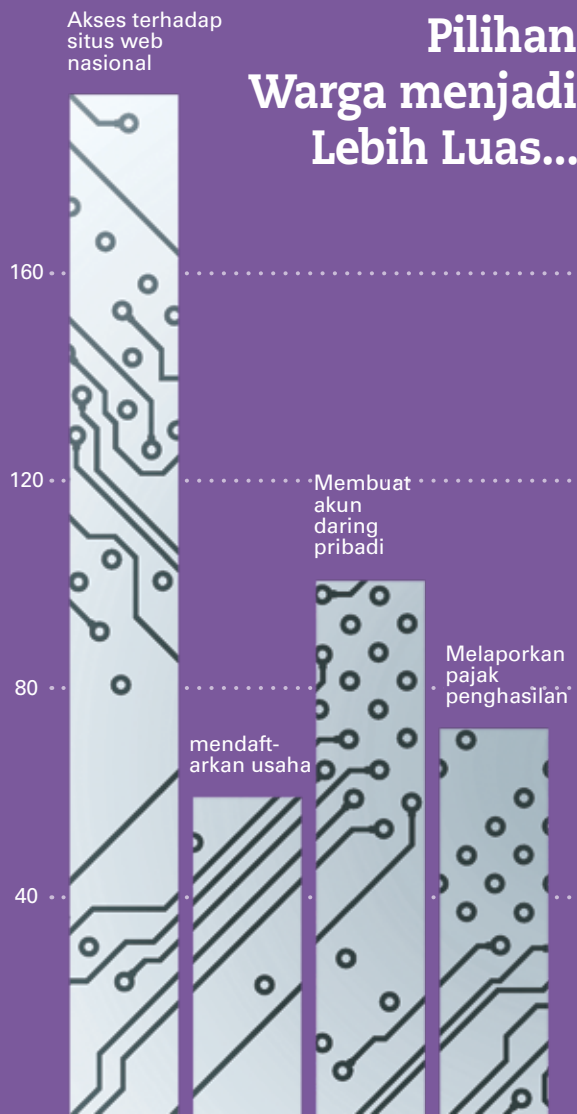
Mengingat mesin dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dan menjadi semakin murah dibandingkan dengan tenaga kerja manusia, kemajuan teknologi baru dapat sangat disruptif. Hal ini dapat mengarah pada semakin berkurang dan tidak stabilnya prospek pekerjaan, dan kesenjangan yang semakin besar, karena kemajuan teknologi cenderung menguntungkan bisnis dan pekerja yang paling terdidik, yang memperburuk kemerosotan kelas menengah dan kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin. Satu makalah IMF menganalisis dampak teknologi terhadap pekerjaan dan menawarkan beberapa opsi kebijakan, seperti peningkatan belanja pemerintah untuk pendidikan dan pelatihan serta menggunakan kebijakan fiskal untuk memastikan pertumbuhan terbagi secara luas.

IMF juga menggali potensi maupun risiko berbagai teknologi keuangan baru. Dikenal sebagai *Fintech*, simpul teknologi-teknologi baru ini mencakup kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), mahadata (*big data*), biometrika, dan teknologi-teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technologies*) seperti *Blockchain*. Teknologi-teknologi tersebut menawarkan banyak keunggulan, termasuk jasa-jasa keuangan yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, lebih inklusif, dan mungkin lebih ramah pengguna. Sebagai contoh, kecerdasan buatan ditambah mahadata dapat melakukan otomatisasi penetapan skor kredit, kontrak-kontrak cerdas (*smart contracts*) dapat memungkinkan para investor untuk menjual aset saat kondisi pasar yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi, dan telepon seluler digabungkan dengan teknologi buku besar terdistribusi dapat memungkinkan dilakukannya transaksi keuangan langsung tanpa melalui perbankan. IMF menemukan bahwa digitalisasi juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah layanan publik. Digitalisasi juga dapat meningkatkan tata kelola dan transparansi fiskal sehingga transaksi-transaksi korup lebih sulit untuk disembunyikan.

Meski demikian, masih ada risiko. Dengan mempercepat laju dan volume transaksi, teknologi-teknologi baru dapat memicu volatilitas pasar yang semakin besar, dan meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber, meningkatkan risiko konsentrasi, dan mengarah pada berkurangnya kendali internal. Teknologi juga dapat membuka peluang bagi aktivitas kejahatan—tidak hanya serangan siber dan pelanggaran privasi, namun juga penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Regulasi perlu beradaptasi dengan dunia keuangan baru ini, termasuk untuk mengatasi kerentanan yang muncul dari peluang-peluang baru bagi penipuan dan serangan siber.

GAMBAR 1.4

Digitalisasi pemerintah: negara-negara dengan layanan digital tertentu, 2016



Bagaimana Teknologi Keuangan (*Fintech*) dapat diregulasi tanpa menghambat inovasi?

Memperluas pengawasan. Karena jasa keuangan semakin bergeser dari lembaga perantara yang sudah mapan menuju jejaring dan platform pasar yang lebih longgar, fokuskan regulasi pada jasa-jasa keuangan tertentu serta entitas-entitas seperti perbankan dan perusahaan-perusahaan asuransi.

Mendorong kerja sama internasional. Karena jejaring dan platform teknologi tidak mengindahkan batasan negara, pastikan adanya koordinasi internasional untuk menghentikan persaingan regulasi yang mengarah pada penurunan kualitas pengawasan (*regulatory race to the bottom*).

Modernisasi prinsip-prinsip hukum. Perjelas hak dan kewajiban dalam tataran keuangan yang baru, termasuk status hukum dan kepemilikan aset-aset digital dan token-token.

Perkuat tata kelola. Kembangkan aturan dan standar untuk menjamin integritas data, algoritma, dan platform dan meningkatkan perlindungan konsumen lintas dimensi, termasuk kontrak terbuka dan berimbang serta hak privasi.

DI BALIK LAYAR

Digitalisasi—integrasi teknologi-teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memfasilitasi ketersediaan dan pengolahan informasi yang lebih andal, tepat waktu dan akurat—menghadirkan peluang dan tantangan penting untuk kebijakan fiskal.

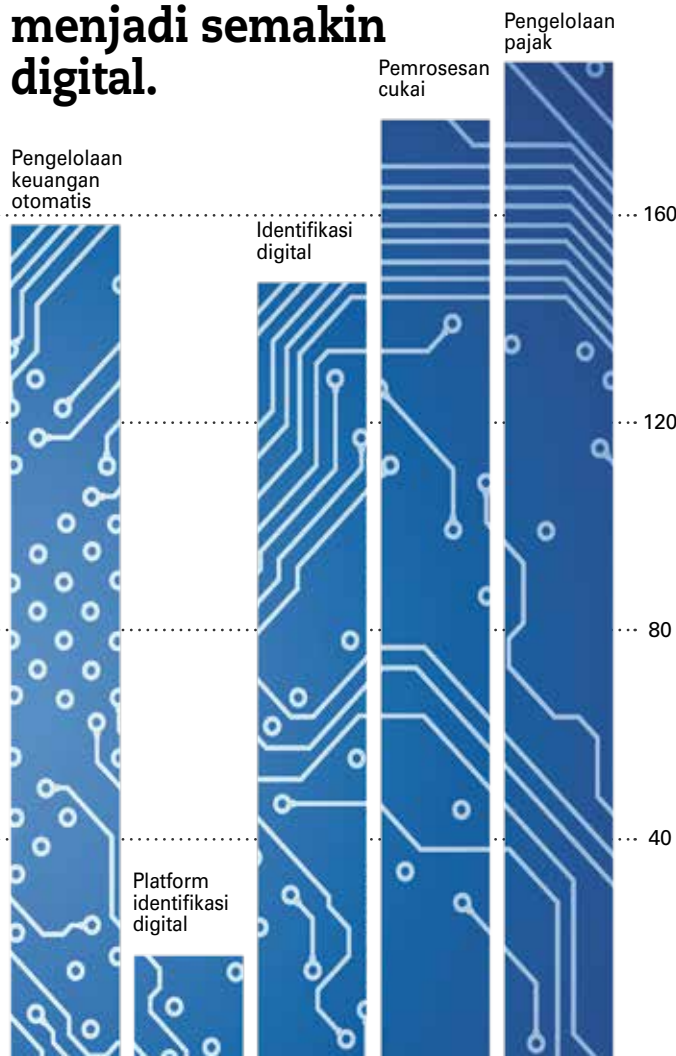
Fiscal Monitor edisi April 2018 menganalisis bagaimana digitalisasi dapat mengubah desain dan implementasi kebijakan fiskal saat ini dan di masa mendatang, dengan contoh-contoh ilustratif administrasi dan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan layanan publik, dan efisiensi belanja. Analisis tersebut menengarai bahwa adopsi perangkat-perangkat digital dapat meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung (*indirect tax*) di perbatasan hingga 2 persen dari PDB setiap tahun. Dari sisi belanja, pengalaman India dan Afrika Selatan menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat membantu meningkatkan perlindungan sosial dan penyaluran manfaatnya. Penanggulangan risiko-risiko dari digitalisasi memerlukan agenda reformasi yang komprehensif, sumber daya yang memadai, dan pendekatan yang terkoordinasi menuju arsitektur perpajakan internasional untuk jangka panjang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang Relevan



...manakala Pemerintah menjadi semakin digital.

Sumber: Survei e-Pemerintah PBB 2016, dan Bank Dunia 2016.
Catatan: PBB menelusuri 193 negara anggota untuk penerapan.





Perjalanan ke Indonesia

Bekerja Bersama Menuju Tujuan Bersama

Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia akan berlangsung di Bali pada bulan Oktober 2018. Pertemuan ini akan menjadi peluang yang unik bagi Indonesia dan Asia untuk menunjukkan berbagai pencapaiannya dan menawarkan pembelajaran bagi negara-negara lain. Indonesia dan mitra-mitra ASEAN-nya telah berhasil menciptakan kelas menengah yang penuh semangat, membuka pintu menuju standar hidup yang lebih tinggi bagi jutaan orang. Melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat selama dua dekade terakhir, mereka juga telah menjadi pendorong utama perekonomian global.



Direktur Pelaksana IMF Lagarde berada di Candi Borobudur di Jawa Tengah (halaman samping); bertemu dengan Presiden Jokowi (halaman ini, kiri atas); dan berkunjung ke anjungan Indonesia saat Pertemuan Musim Semi 2018 (halaman ini, kanan bawah).



Mengeksplorasi Hubungan dan Kerja Sama di Kawasan

PERAYAAN 20 TAHUN KANTOR REGIONAL UNTUK ASIA DAN PASIFIK

Lebih dari 400 orang termasuk para gubernur bank sentral dari Mongolia dan Nepal menghadiri perayaan memperingati 20 tahun Kantor Regional untuk Asia Pasifik (*Regional Office for Asia and the Pacific-OAP*), yang diselenggarakan bersama oleh IMF dan Kementerian Keuangan pada bulan November di Tokyo.

Acara resepsi ini menjadi semacam reuni bagi OAP, dihadiri oleh para mantan direktur termasuk Kunio Saito, direktur pertama, dan staf yang datang dari luar negeri, orang-orang yang pernah bekerja di IMF, dan yang bekerja keras untuk membuka Kantor ini di Tokyo pada tahun 1997. Taro Aso, Wakil Perdana Menteri, dan Haruhiko Kuroda, Gubernur Bank Jepang, menyampaikan sambutan untuk merayakan peristiwa ini.

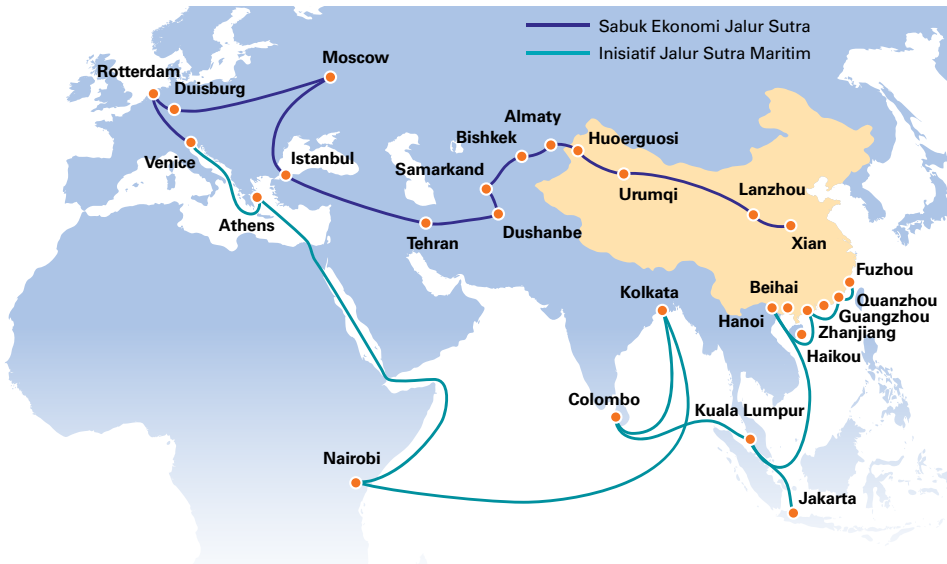
Dalam sambutan utamanya, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde berbicara mengenai *Gakuensai* Jepang, festival universitas yang sangat populer dan diselenggarakan oleh para mahasiswa, yang menurutnya “berwawasan ke depan” dan “tertanam

kokoh pada pertukaran pengalaman,” dan itu adalah deskripsi yang tepat mengenai kemitraan antara Jepang dan IMF.

Pada pertemuan umum dan terbuka (*townhall meeting*) bersama Direktur Pelaksana, lebih dari 60 penerima beasiswa Program Beasiswa Jepang-IMF untuk Asia (JISPA) hadir dan mengajukan pertanyaan mengenai pandangan-pandangan IMF tentang risiko bagi pertumbuhan ekonomi di Asia. JISPA didanai oleh Kementerian Keuangan dan dikelola oleh OAP.

OAP akan memperbesar tapak IMF di kawasan ini dengan terus mengelola JISPA dan dengan menyelenggarakan seminar-seminar pengembangan kapasitas dan konferensi-konferensi kebijakan di kawasan tersebut, serta dengan mengelola hubungan di tingkat lapangan (*on-the-ground relations*) antara IMF dengan berbagai forum regional, termasuk forum Kerja Sama Perekonomian Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation-APEC*) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations - ASEAN*).





INISIATIF SABUK DAN JALAN (BELT AND ROAD INITIATIVE)

Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, yang diluncurkan pada tahun 2013, bertujuan untuk mendorong konektivitas dan kerja sama di bidang infrastruktur, perdagangan, keuangan, dan pertukaran antara masyarakat dengan masyarakat dengan menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika melalui Timur Tengah dan lintas Pasifik ke negara-negara Amerika Latin. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan sumber daya yang signifikan dari Tiongkok dan sumber-sumber lain, termasuk sektor swasta, untuk mendukung

pembangunan dan meningkatkan prospek pertumbuhan. Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional yang banyak menarik perhatian, pada bulan Mei 2017, diselenggarakan oleh Tiongkok dan meletakkan garis besar peta jalan untuk inisiatif ini.

Konferensi Tingkat Tinggi tentang Rerangka Ekonomi Makro dan Keuangan untuk Keberhasilan Implementasi Inisiatif Sabuk dan Jalan pada bulan April 2018, diselenggarakan oleh *People's Bank of China* dan IMF. Diskusi-diskusi

yang diselenggarakan fokus pada bagaimana mewujudkan potensi inisiatif ini dan memaksimalkan manfaatnya sementara menjamin keberlangsungan utang (*debt sustainability*) dan pemilihan proyek yang tepat.

Pada kegiatan tersebut, Direktur Pelaksana IMF dan Gubernur Yi Gang dari *People's Bank of China* meresmikan Pusat Pengembangan Kapasitas Tiongkok-IMF (*China-IMF Capacity Development Center-CICDC*). Pusat ini akan bekerja dengan

berbagai negara melalui kursus pelatihan, lokakarya, dan kegiatan belajar sejawat (*peer learning*), yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. CICDC akan berkantor di Beijing dan akan mendukung kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar Tiongkok, termasuk negara-negara yang terkait dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan

Berinvestasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan

POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM TERWUJUD

Tantangan kebijakan yang paling utama di Afrika Sub-Sahara adalah meningkatkan standar kehidupan dengan mencapai SDGs. Sumber pembiayaan pembangunan yang paling andal adalah pendapatan yang dihasilkan dari dalam negeri. Dengan dukungan penguatan kapasitas dan dukungan pinjaman IMF, kawasan ini telah meraih kemajuan yang signifikan selama dua dekade terakhir (Gambar 1.5) namun masih banyak potensi untuk meningkatkan perolehan pendapatan dalam negeri.

Sebuah kajian IMF terkini memberikan estimasi bahwa Afrika Sub-Sahara dapat memobilisasi hingga 5 persen PDB tambahan penerimaan pajak—jauh lebih banyak daripada jumlah bantuan internasional yang diterima setiap tahun. Untuk mewujudkan potensi ini, negara-negara harus melanjutkan upaya untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan dan memperluas basis pajaknya.

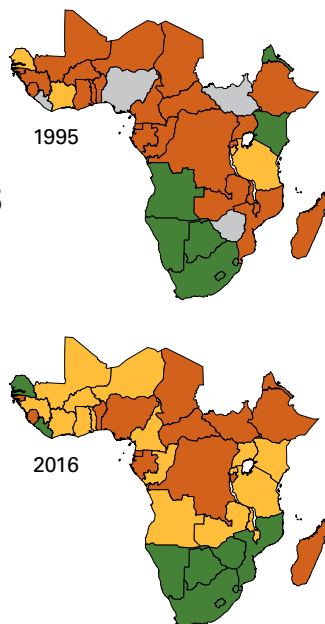
GAMBAR 1.5

Afrika Sub-Sahara: Penerimaan Pajak terhadap PDB, 1995 dan 2016

(Persentase PDB)

- Kurang dari 13%
- Antara 13% dan 18%
- Lebih dari 18%
- Tidak ada data tersedia

Sumber: Departemen Afrika IMF.



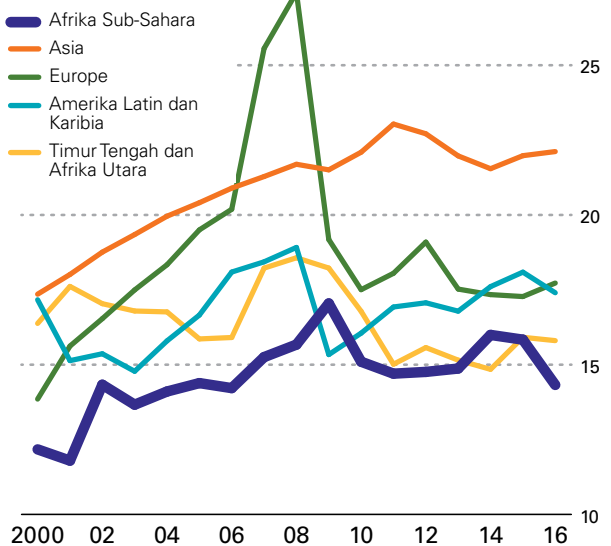
INVESTASI SWASTA UNTUK MENGGALAKKAN KEMBALI PERTUMBUHAN

Investasi swasta di Sub-Sahara Afrika selama ini tertinggal dibandingkan dengan kawasan lain (Gambar 1.6). Peningkatan investasi swasta dalam dan luar negeri sangat penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Analisis empiris menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi saat ini dan prospek di masa mendatang menjadi faktor utama yang mendorong keputusan perusahaan-perusahaan swasta untuk berinvestasi. Selain itu, dampak pertumbuhan terhadap keputusan-keputusan investasi swasta dapat diperkuat oleh kerangka regulasi dan kepastian yang lebih baik, pasar keuangan yang lebih dalam, dan liberalisasi perdagangan.

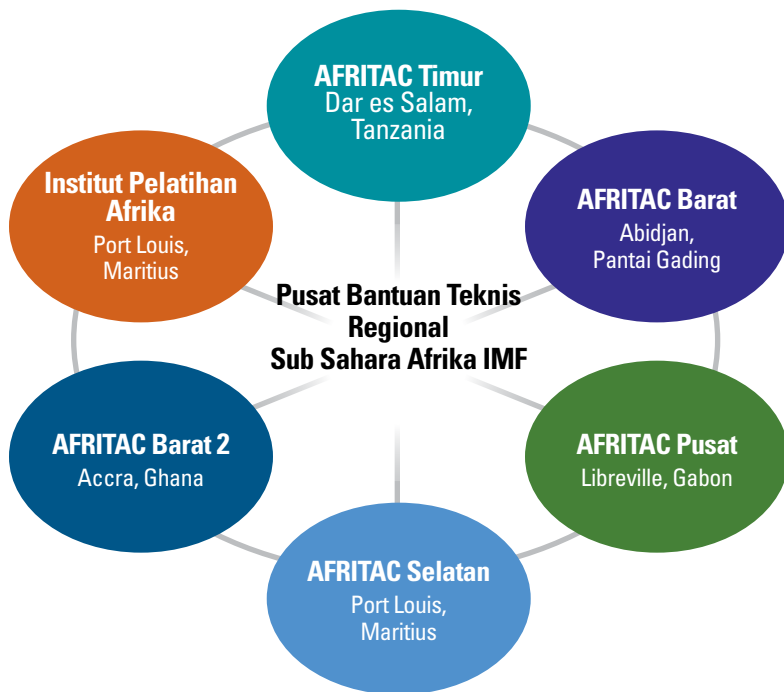
GAMBAR 1.6

Negara-negara berkembang: investasi swasta terhadap PDB, 2000–16

(Persentase terhadap PDB)



Sumber: IMF, *World Economic Outlook database*.



Tinjauan Umum

PEMBELAJARAN SEJAWAT (PEER LEARNING) DI AFRIKA SUB-SAHARA

Sebuah jejaring yang terdiri dari enam pusat regional, mencakup seluruh Afrika Sub-Sahara, mengoordinasikan sebagian besar upaya pengembangan kapasitas IMF di lapangan, mendukung pembangunan institusi ekonomi dan tata kelola yang baik di kawasan tersebut. Pusat-pusat ini memastikan adanya koordinasi yang erat dengan para pejabat negara anggota dan mitra pembangunan lain dan dibiayai oleh para mitra pembangunan, negara-negara anggota, dan IMF. Saran praktis, pelatihan regional, dan lokakarya yang berorientasi kebijakan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran sejawat

(peer learning) agar negara-negara dapat berbagi praktik terbaik dan mendorong integrasi regional. Pada tahun 2018, kegiatan-kegiatan tersebut mencakup: lokakarya yang diselenggarakan bersama Pemerintah Senegal dan *G20 Compact with Africa* tentang diversifikasi dan pertumbuhan; konferensi yang diselenggarakan bersama Pusat Afrika untuk Transformasi Ekonomi (*African Center for Economic Transformation*) dan Pemerintah Ghana untuk mobilisasi penerimaan domestik untuk mengatasi ketergantungan terhadap bantuan; dan konferensi yang diselenggarakan bersama Pemerintah Rwanda dan *UN Women* tentang cara mendorong kesetaraan gender. Tema lainnya yang menonjol adalah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung perpajakan.



Menstabilkan dan Memperkuat Ekonomi Eropa

KAPASITAS FISKAL TERPUSAT UNTUK KAWASAN EURO

Krisis kawasan Euro telah menyingkap kelemahan-kelemahan dalam fungsi penyatuan mata uang, dan staf IMF telah berpendapat bahwa integrasi lebih lanjut akan membuat kawasan Euro lebih tangguh terhadap guncangan-guncangan. Sebuah makalah IMF mengajukan satu proposal untuk menciptakan sebuah kapasitas fiskal terpusat (*centralized fiscal capacity*) bagi kawasan Euro yang dapat membantu meredam guncangan-guncangan, baik yang spesifik terhadap negara tertentu maupun yang bersifat umum. Secara khusus, makalah ini mengusulkan suatu dana stabilisasi ekonomi makro yang dibiayai dari kontribusi tahunan berbagai negara, yang digunakan untuk membangun aset pada saat kondisi baik dan melakukan transfer ke negara-negara di saat kondisi buruk, serta membangun kapasitas peminjaman (*borrowing capacity*) ketika guncangan besar menghabiskan aset dari dana ini.

Berbagai simulasi menunjukkan bahwa, meski dengan kontribusi yang relatif tidak terlalu besar, skema tersebut dapat memberikan stabilisasi ekonomi makro yang cukup berarti pada masa-masa penurunan. Kapasitas fiskal terpusat membutuhkan adanya pembagian risiko antar negara; dengan demikian, untuk menghindari masalah *moral hazard*, transfer-transfer akan dilakukan bersyarat dengan mematuhi aturan fiskal Uni Eropa. Catatan tersebut juga membahas beberapa fitur yang ditujukan untuk menghindari transfer permanen antar negara dan membuat kapasitas fiskal terpusat agar dapat berfungsi secara otomatis—untuk membatasi ruang sengketa terhadap pelaksanaannya—kedua hal tersebut merupakan poin penting yang harus dibuat agar dapat diterima secara politik.





MEN-TRANSFORMASI PEREKONOMIAN PERANCIS

Konferensi tentang “Transformasi Perekonomian Perancis dan Penyempurnaan Integrasi *Eurozone*” di Paris, Perancis, pada Februari 2018, mempertemukan para pembuat kebijakan terkemuka, ekonom, perwakilan sektor swasta utama untuk mendiskusikan bagaimana memperkuat ketangguhan dan potensi pertumbuhan Perancis dan kawasan Euro. Konferensi tersebut diselenggarakan bersama oleh IMF dan Perbendaharaan Perancis (*French Treasury*).

Dalam perbincangan dengan Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde

menekankan pentingnya memanfaatkan pemulihan ekonomi saat ini untuk mendorong agenda reformasi yang ambisius, baik pada tataran nasional maupun di tingkat Eropa, untuk mendorong peningkatan lapangan kerja dan produktivitas.

DEBAT KEBIJAKAN DI JERMAN

Para ekonom dan pembuat kebijakan tingkat tinggi dari Jerman dan negara-negara lain bertemu pada suatu konferensi yang diselenggarakan bersama oleh IMF dan Bank Sentral Jerman (*Deutsche Bundesbank*) untuk mendiskusikan debat kebijakan ekonomi pada bulan Januari 2018. Konferensi ini fokus pada bidang-bidang di mana perdebatan cukup intens: perkembangan upah dan inflasi, posisi kebijakan fiskal yang sesuai, neraca

transaksi berjalan Jerman yang mengalami surplus, dan agenda pasca krisis untuk kawasan Euro dan Jerman. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden *Deutsche Bundesbank* Jens Weidmann menyampaikan sambutan utama mereka, dan acara tersebut menghadirkan pertukaran pandangan yang menarik dan membuka peluang bagi IMF untuk memperdalam hubungannya dengan Jerman.

MENJAGA PEMULIHAN DI SPANYOL

Keberhasilan Spanyol merespons krisis keuangan menjadi fokus dari konferensi “Spanyol—dari Pemulihan menuju Ketangguhan,” yang diselenggarakan bersama antara IMF dan Bank Sentral Spanyol

(*Banco de España*) di Madrid pada bulan April 2018. Peserta konferensi tersebut membagikan pengalaman dan opsi-opsi kebijakan untuk memastikan adanya jalur perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif ke depan. Deputi Direktur Pelaksana Pertama IMF David Lipton menyampaikan sambutan utama. Tantangan-tantangan utama yang didiskusikan untuk perekonomian Spanyol berhubungan dengan utang pemerintah yang meningkat, reformasi pasar tenaga kerja yang belum selesai, dan lemahnya produktivitas dan prospek pertumbuhan jangka menengah. Konferensi ini juga memperdebatkan bagaimana arsitektur Eropa dapat lebih diperkuat, khususnya dengan menyelesaikan upaya penyatuan perbankan.

Mendukung Pertumbuhan Inklusif melalui Reformasi Pemerintah

BAGAIMANA PEMERINTAH DITIMUR TENGAH DAPAT “BERTINDAK SEKARANG (ACT NOW)”

Tujuh tahun setelah Arab Spring, masyarakat di kawasan ini masih menginginkan peluang ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan 60 persen penduduk di kawasan ini lebih muda dari 30 tahun dan 27 juta kalangan muda bergabung dengan angkatan kerja dalam lima tahun ke depan, para pembuat kebijakan harus “BERTINDAK SEKARANG (ACT NOW)” untuk menciptakan berbagai peluang. Konferensi bulan Januari 2018 bertajuk “Peluang bagi Semua” di Marrakesh, Maroko, yang diselenggarakan IMF, Dana Arab untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Dana Moneter Arab, dan Pemerintah Maroko mengajak para pemerintah untuk memprioritaskan reformasi yang mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui peningkatan:

Accountability (Akuntabilitas): meningkatkan transparansi, menguatkan kelembagaan, dan mengatasi korupsi.

Competition (Kompetisi): menggalakkan sektor swasta melalui akses keuangan yang lebih baik dan regulasi.

Technology (Teknologi) dan perdagangan: peningkatan daya ungkit untuk mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru.

No one left behind (Tidak ada yang tertinggal): membangun jaring pengaman yang kuat dan memperkuat hak pemuda, perempuan, penduduk perdesaan, dan pengungsi.

Opportunity (Peluang): meningkatkan belanja sosial dan investasi dan mengupayakan perpajakan yang lebih adil.

Work (Kerja): berinvestasi pada manusia dan mereformasi pendidikan untuk membekali pekerja menghadapi ekonomi baru.



Direktur Pelaksana IMF
Christine Lagarde mengunjungi
Pusat Pelatihan Perempuan Amal
dan Restoran Maroko di Marakesh



PROGRAM REFORMASI MESIR MEMBANTU STABILISASI EKONOMI

Transisi politik yang berkepanjangan dan ketidakstabilan regional di Mesir setelah 2011 telah memperberat berbagai tantangan struktural yang sudah lama berlangsung. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan yang lambat, utang pemerintah yang tinggi, dan cadangan pemerintah yang menipis. Pada tahun 2016, untuk memulihkan stabilitas ekonomi makro, pemerintah mengembangkan sebuah program reformasi kebijakan dan struktural, didukung oleh skema tiga tahun yang diperpanjang di bawah *Extended Fund Facility* IMF, untuk meningkatkan daya saing eksternal, mengurangi utang pemerintah, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Bagian utama dari program ini adalah meningkatkan mobilisasi penerimaan. Sebuah Penilaian Diagnostik Administrasi Perpajakan telah menentukan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan, termasuk dalam pelaporan surat

pemberitahuan pajak dan pembayaran pajak. Administrasi Pajak Mesir bekerja dengan METAC (pusat pengembangan kapasitas regional IMF yang berpusat di Beirut), untuk memperkenalkan prosedur-prosedur baru di kantor-kantor percontohan. Kantor-kantor tersebut telah memberi hasil yang menggembirakan. Tingkat penerimaan dan pelaporan pajak di kantor-kantor percontohan rata-rata meningkat dua kali lipat dibandingkan kantor-kantor lain yang bukan percontohan. Pemerintah Mesir sedang mengupayakan ekspansi reformasi-reformasi ini untuk membantu mereka mengurangi penghindaran pajak dan korupsi.

Setelah satu tahun di bawah program tersebut, defisit eksternal dan fiskal telah berkurang dan pertumbuhan mengalami percepatan. Program reformasi pemerintah telah memainkan peran kunci dalam stabilisasi keadaan, termasuk menekan kekurangan mata uang asing, memperkuat bantuan sosial, dan mengembangkan investasi swasta dan pertumbuhan.

PERBAIKAN SEKTOR KEUANGAN DI KAUKASUS DAN ASIA TENGAH

Guncangan eksternal sejak 2014, seperti harga komoditas yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat di negara-negara mitra dagang utama, telah memberikan tekanan terhadap sektor perbankan di delapan negara-negara Kaukasus dan Asia Tengah (*Caucasus and Central Asia—CCA*). Guncangan-guncangan ini telah memperparah kerentanan keuangan, termasuk kualitas aset yang lemah, dolarisasi tinggi, peminjaman kepada entitas terkait (*connected lending*), dan kelemahan dalam regulasi dan pengawasan keuangan. Semua negara-negara CCA telah mengambil langkah kebijakan untuk menanggapi gejala-gejala tersebut, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk memulihkan kesehatan sektor perbankan negara-negara CCA.

Strategi yang tepat akan bergantung pada kesehatan keuangan perusahaan dan akan memerlukan penetapan prioritas tujuan. Negara-negara di mana risiko terhadap stabilitas keuangan tetap tinggi perlu fokus untuk menilai kesehatan bank secara akurat dan melakukan penanganan terhadap yang tidak layak. Selain itu, berbagai upaya perlu diarahkan untuk menguatkan kerangka regulasi dan pengawasan di semua negara CCA, yang mencakup reformasi-reformasi berikut: struktur tata kelola yang kuat yang mewujudkan pengelolaan risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal yang independen; supervisi yang efektif berbasis risiko dan terkonsolidasi; kerangka makroprudensial; dan penilaian risiko kredit yang lebih baik. Jika diimplementasikan dengan komitmen kuat dari lembaga-lembaga yang berwenang, tindakan-tindakan ini akan mengampu sektor perbankan untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih inklusif.

Mengatasi Tantangan Ekonomi

FORUM KARIBIA: MEMBUKA PELUANG PERTUMBUHAN Sambil MEMPERKUAT KETANGGUHAN

Forum Tingkat Tinggi Karibia yang diselenggarakan di Kingston, Jamaika, pada bulan November 2017 diselenggarakan pada waktu yang tepat, karena kawasan ini sedang menghadapi berbagai tantangan—kerentanan fiskal dan keuangan, pengangguran kalangan muda, dan paparan terhadap bencana alam yang sering terjadi dan berbiaya tinggi, membatasi pertumbuhan ekonomi

di kawasan tersebut. Para peserta berdiskusi mengenai cara menyeimbangkan utang dan pertumbuhan pada momen siklus perekonomian dan politik saat ini.

Setelah forum tersebut, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde bergabung dalam pertemuan terbuka dengan mahasiswa *University of the West Indies*, di mana staf IMF meluncurkan buku: *Unleashing Growth and Strengthening Resilience in the Caribbean* (Membuka Peluang Pertumbuhan dan Memperkuat Ketangguhan di Karibia). Buku ini menyajikan penelitian terkini

yang dilakukan IMF terkait perekonomian negara-negara Karibia. Buku ini menganalisis ketidakseimbangan ekonomi makro kawasan dan melihat hambatan struktural yang memengaruhi daya saing dan pertumbuhan dalam perekonomian kawasan yang padat pariwisata.

Jamaika bekerja erat dengan IMF untuk membangun institusi-institusi ekonomi untuk mengatasi sebagian tantangan tersebut. Banyak dari pekerjaan tersebut dikoordinasikan oleh CARTAC (pusat pengembangan kapasitas regional IMF yang berpusat di Barbados).

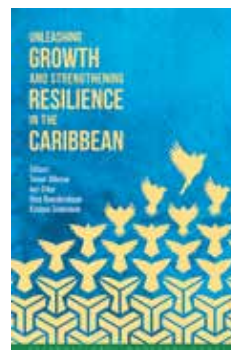


STABILITAS EKONOMI MAKRO PARAGUAY

Pada bulan Maret 2018, Direktur Pelaksana mengunjungi Asunción untuk bertemu dengan Presiden Horacio Cartes dan pejabat senior lainnya, mengunjungi proyek-proyek sosial, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Setelah 24 tahun sejak kunjungan terakhir Direktur Pelaksana IMF ke negara tersebut, Lagarde mencatat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial Paraguay yang mengesankan. Dengan latar tersebut, diskusi yang diselenggarakan fokus pada pentingnya penguatan stabilitas ekonomi makro Paraguay, memastikan pertumbuhan yang inklusif, dan memanfaatkan “bonus demografi” dengan penduduk yang relatif muda. Rencana Pembangunan Nasional Paraguay telah menetapkan prioritas investasi di bidang-bidang seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.



Deputi Direktur IMF Departemen Belahan Dunia Barat Krishna Srinivasan (kiri) berbincang dengan Dekan Fakultas Bisnis Stern Universitas New York Peter Blair Henry (kanan) pada Forum Karibia 2017 di Kingston, Jamaika.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

SDGs resmi diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada KTT PBB di New York pada tahun 2015, menggantikan MDGs yang telah berakhir. Ke-17 SDGs fokus pada lima elemen utama: manusia, planet, perdamaian, kemakmuran, dan kemitraan. Dalam lingkup mandatnya, IMF berkomitmen pada kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. IMF telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan dukungannya kepada negara-negara anggota dalam cara-cara yang krusial dalam upaya mereka meraih SDGs.



Desain: Beth Singer Design LLC www.bethsingerdesign.com

Desain Web: Feisty Brown www.feistybrown.com

Fotografi: Sampul depan: © Getty Images @Alamy @Alamy @iStock @Alamy (searah jarum jam dari atas). **Halaman 1:** © Alamy (kiri atas) © IMF (kiri bawah). **Halaman 10:** © iStock (atas), © iStock (kiri bawah). **Halaman 14:** © IMF. **Halaman 15:** © IMF (baris pertama, kiri) © iStock (baris kedua, kanan), © iStock (baris kedua, kiri), © IMF (baris kedua, tengah), © IMF (baris kedua kanan), © IMF (baris ketiga, kiri), © iStock (baris ketiga, tengah), © IMF (baris ketiga, kanan), © iStock (bawah). **Halaman 16:** © IMF. **Halaman 17:** © Alamy (kiri atas), © Alamy (atas tengah), © Alamy (kanan atas), © iStock (kanan bawah). **Halaman 19:** © Getty Images (atas), © Getty Images (kedua dari atas), © IMF (ketiga dari atas), © Getty Images (kiri bawah), © iStock (kanan bawah). **Halaman 20:** © iStock (kiri atas), © iStock (kiri bawah), © Alamy (tengah atas), © iStock (tengah bawah), © iStock (kanan). **Halaman 21:** © iStock. **Halaman 22:** © IMF. **Halaman 23:** © Newscom (kiri atas) © iStock (kiri bawah), © iStock (tengah), © iStock (kanan). **Halaman 24:** © IMF (kiri bawah), © Alamy (kanan atas), © Newscom (kanan bawah). Sampul belakang: © Getty Images, © Alamy, © iStock, © iStock, © Getty Images, © Alamy, © Getty Images (searah jarum jam dari atas).



“Agar benar-benar berhasil,
kita harus bertindak
bersama-sama. Kerja sama
masih menjadi cara terbaik
untuk menciptakan masa
depan yang lebih sejahtera
bagi semua bangsa.”

Christine Lagarde
Direktur Pelaksana



Dana Moneter Internasional
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 USA

www.imf.org